

# PERENCANAAN BAHASA BALI (MENGANTISIPASI KETERPURUKAN BAHASA, AKSARA, DAN SASTRA BALI)

I Made Suweta

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja

---

## ABSTRACT

*As a mother tongue , the language of Bali should as a first language known by the younger generation Bali . The reality is not like that , just a lot of the younger generation Bali could not communicate with the Balinese language is good and right. How could the younger generation can understand and ngalakoni Bali culture Bali , was the source language is not understood?*

*Bali government should find a way out so that the people of Bali are not too far off the rails cultural identity. One way is to make language planning Bali, so the Balinese language with the content value of high culture in it can permeate the ideological order of the Balinese people, so it can be used as an anticipatory measure refraction community character. Bali language planning include: planning in development terms, compose, research, and education.*

**Keywords: Mother, Shift in Cultural Values, Ideology**

---

## I. PENDAHULUAN

Dalam dasa warsa terakhir, pergeseran nilai sosial budaya Bali sebagaimana dikhawatirkan oleh berbagai kalangan ilmuwan dan budayawan semakin menjadi kenyataan. Kejujuran, sopan santun, tenggang rasa, hormat pada catur guru, rasa malu berbuat salah kian hari kian menjauh. Hal ini dapat dilihat dari adanya fenomena semakin banyaknya kasus korupsi, tawuran, ngulah pati, konflik pasorohan, kesepekang, dan sebagainya. Yang paling hangat di ingatan kita adalah terjadinya bentrok antar ormas BB dan LB yang berakibat beberapa nyawa melayang sia-sia. Ini artinya peradaban Bali yang adiluhung sudah tercabik-cabik akibat terjadinya pergeseran nilai budaya terbut.

Bercermin dari fenomena yang berakibat tercabiknya nilai budaya Bali yang semakin masif, berarti kemajuan dalam bidang sosial ekonomi yang dimotori oleh ekonomi

pariwisata tidak serta merta membuat orang Bali menjadi tenteram hidupnya. Sekaligus patut menjadi renungan apakah pembangunan sosial budaya untuk meneguhkan jati diri sebagai orang Bali yang dulunya terkenal kukuh memegang teguh nilai-nilai spiritual yang bersumberkan pada ajaran agama Hindu (*trikaya parisuda, tri hita karana, tattwam asi, asih punya bhakti, paras-paros menyamabraya, sagalak-sagilik, saling asah saling asih saling asuh*) sudah terpatri mengsumsum tulang dalam kepribadian orang Bali? Bagaimana mungkin nilai-nilai budaya adiluhung tersebut bisa berurat berakar pada kepribadian orang Bali, kalau bahasa Bali sendiri sebagai sentral kebudayaan Bali semakin dijauhi oleh generasi muda Bali? Sangat dilematis, di satu pihak bahasa Bali sebagai pembangun peradaban diharapkan bisa membangun karakter masyarakat Bali, tetapi

di pihak lain bahasa Bali sebagai bahasa ibu ditinggalkan oleh generasi muda Bali. Pemda Bali, baik Pemkab maupun Pemprov harus segera ngeh tentang hal ini sebelum Bali hancur dilindas oleh jaman akibat pergeseran budaya yang terlalu jauh dari jati dirinya. Salah satu cara yang dalam tulisan ini ditawarkan adalah perlu membuat perencanaan bahasa Bali untuk mengantisipasi kemerosotan moral lebih jauh.

Bahasa Bali merupakan salah satu bahasa daerah di kawasan Nusantara yang masih hidup dan berkembang, serta memiliki pendukung yang cukup banyak. Banyaknya pendukung bahasa Bali merupakan salah satu pertanda bahwa bahasa itu memiliki peranan yang amat penting dalam tata kehidupan masyarakat Bali. Hal ini tampak dari kedudukan bahasa Bali dalam pendidikan, kehidupan rumah tangga, kebudayaan Bali, kesenian, media masa, dan aktivitas beragama Hindu (Jendra, dkk., 1975/1976:114).

Melihat peranan penting bahasa daerah Bali, maka dipandang perlu diambil langkah pelestarian secara sistematis dan terprogram, salah satu yang bisa dilakukan melalui pengambilan kebijakan dan perencanaan bahasa secara tepat dan realistis. Melaksanakan kebijakan dan perencanaan bahasa Bali dengan tepat akan memberikan efek positif; baik kepada bahasa daerah maupun terhadap perkembangan bahasa nasional, karena di satu pihak kelestarian bahasa Bali akan tetap terjaga dan di pihak lain ikut memupuk dan menumbuhkan bahasa nasional. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhubungan dengan Bab XV, Pasal 36 pada bagian penjelasan, menyatakan bahwa bahasa daerah yang masih dipakai sebagai alat perhubungan, yang hidup dan dibina oleh masyarakat pemakainya, juga dihargai dan dipelihara oleh negara, karena bahasa-bahasa itu merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang masih hidup dan berkembang (Halim, 1980:151).

## II. PEMBAHASAN

### 2.1 Bahasa Bali dalam Ragam Tulis Bali Latin

Degradasi bahasa Bali dapat dilihat dari semakin berkurangnya aktivitas karang-mengarang/menulis dengan bahasa Bali, seperti: penulisan artikel, peper, kertas kerja, dan karangan ilmiah lainnya. Walaupun ada beberapa media khusus berbahasa Bali, tetapi minat masyarakat untuk menulis dan membaca sangat terbatas. Juga beberapa Perguruan Tinggi yang membuka Jurusan Bahasa Bali berupaya penyusunan skripsi menggunakan berbahasa Bali, tetapi mahasiswa sangat mengalami kesulitan dalam membuat tulisan agar sesuai dengan kaidah bahasa Bali yang baik dan benar.

Berkaitan dengan adat dan budaya, khususnya dalam penulisan *awig-awig* masih menggunakan bahasa Bali dengan huruf Bali dan Latin, tetapi cenderung hanya bersifat dokumenter. Sebagai alat komunikasi yang masih efektif, bahasa Bali tidak cukup hanya sebagai dokumentasi budaya saja, bahasa Bali seharusnya tetap pada fungsi hakiki bahasa yang komunikatif secara efektif; baik secara tulisan maupun lisan yang menjadi bagian kehidupan masyarakat sehari-hari.

### 2.2 Bahasa Bali dalam Ragam Tulis Aksara Bali

Bahasa Bali tulis yang tergolong aksara Bali terdapat pada naskah-naskah lontar; baik yang menjadi koleksi masyarakat maupun tersimpan di skriptorium secara lokal, nasional, maupun internasional, namun sebagian besar masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk membacanya, apalagi dari kalangan generasi muda, hanya sebagian kecil yang tertarik dan bisa membaca aksara Bali. Lontar sebagai warisan budaya Bali *adiluhung*, yang banyak menyimpan ilmu pengetahuan, tentu tidak akan banyak memberi manfaat apabila hanya menjadi pajangan saja karena tidak bisa dibaca dan tidak bisa diungkapkan isinya.

Apabila tidak ada regenerasi untuk meneruskan kemampuan menulis dan membaca lontar sebagai salah satu keunggulan Bali ini, lambat laun keunggulan Bali ini akan mengalami kepunahan.

Tulisan bahasa Bali dengan aksara Bali banyak digunakan dalam kegiatan upacara agama Hindu seperti: surat *kajang* pada upacara *ngaben*, *ulap-ulap* dalam upacara *mlaspas* bangunan, dan berbagai bentuk *rerajahan* berkaitan dengan upacara agama Hindu. Namun sebagian besar masyarakat tidak mampu menulis dan membaca aksara Bali itu, hanya diketahui oleh kalangan terbatas pemimpin upacara agama yakni *pandita/pinandita*. Dalam era egaliter dewasa ini, umat Hindu semakin kritis terhadap ajaran agamanya, sepantasnya masyarakat Bali juga perlu tahu aksara Bali yang menjadi bagian dari simbol agamanya, agar agama Hindu dapat dipahami dengan baik, tidak hanya menjadi dogmatis tradisi *gugun tuwon* saja (Suweta, 2006:19-17; Sudiarta, 2000:40; Watra, dkk.:1-6).

### 2.3 Bahasa Bali dalam Bersastra

Dalam pengklasifikasian sastra Bali terdapat kelompok Sastra Bali klasik dan kelompok Sastra Bali modern. Yang termasuk Sastra Bali klasik adalah satua-satua Bali, paribasa Bali (*bladbadan*, *sesonggan*, *sesenggakan*, *cecimpedan*, *cecangkriman*, *peparikan*, dan sebagainya), dan sastra bertembang (*sekar rare*, *sekar alit*, *sekar madya*, dan *sekar agung*). Yang termasuk Sastra Bali modern adalah puisi dan prosa (novel dan cerpen) yang berbahasa Bali (Bagus dan Ginarsa, 1978).

Tradisi *satua* Bali, yang di dalamnya terdapat muatan pendidikan moral pada usia dini, yang pada jaman dahulu menjadi bagian pendidikan informal, kini sudah tidak ada lagi. Jangankan pada generasi muda, pada generasi tua pun sudah tidak mampu *masatua* Bali, bagaimana mungkin bisa menceritakannya

pada generasi muda. Padahal *masatua* Bali, tidak semata muatan pendidikan moral, tetapi juga komunikasi bahasa Balinya, karena harus disampaikan dengan bahasa Bali, sesuai dengan situasi dan kondisi tokoh dalam satua Bali tersebut.

Kegiatan bersastra Bali tradisional masih ada pada kelompok *pasantian* di masyarakat, tetapi diminati oleh sebagian kecil masyarakat Bali. Di samping juga teks sastra *kakawin*, *geguritan*, *parwa*, dan kidung) yang seharusnya berhuruf Bali, tetapi pada beberapa kelompok *pasantian*, teks yang digunakan adalah yang beraksara Latin, dengan alasan bagi yang tidak bisa membaca aksara Bali juga bisa ikut dalam *Pasantian*. Alasan demi kemudahan dalam pembacaan, lalu teks sastra yang seharusnya beraksara Bali diganti dengan teks yang beraksara Latin, tentu hal ini mengabaikan upaya pelestarian aksara Bali itu sendiri. Padahal apabila teks yang diacu sebagai bahan bacaan bertulisan aksara Bali, akan secara tidak langsung peserta *pasantian* akan berusaha mempelajari aksara Bali dengan baik, berarti pelestarian kesusastraan Bali bersamaan sekaligus dengan upaya pelestarian aksaranya.

### 2.4 Bahasa Bali dalam Berkesenian

Aktivitas berbahasa Bali juga terdapat dalam kegiatan berkesenian seperti: drama gong, wayang, sendratari, bondres, dan kesenian lainnya. Tetapi semua bentuk kesenian itu kadang bersifat temporer. Sebagai contoh misalnya drama gong yang dahulunya ‘boming’ sekali digandrungi masyarakat, tetapi sekarang pementasan drama gong sudah mulai sangat jarang. Demikian juga pementasan wayang, bondres, sendratari, hanya sewaktu-waktu saja. Demikian juga lagu pop Bali yang sekarang ini masih trend, kadang bahasa yang digunakannya keluar dari kaidah berbahasa Bali yang baik dan benar; walaupun bisa saja dicarikan pembenaran karena untuk kepentingan berkesenian, namun seharusnya tetap perlu mendapatkan pembinaan bahasa Bali.

Pembinaan bahasa Bali dalam kegiatan berkesenian tidak cukup hanya pada even-even tertentu saja, hanya bersifat musiman saja. Tetapi akan sangat baik pembinaan dilakukan oleh tenaga penyuluh bahasa Bali profesional, yang dilakukan secara sistematis, terprogram, dan berkesinambungan. Sehingga aktivitas berkesenian, tidak semata hanya untuk menghibur masyarakat, tetapi memiliki misi juga untuk melestarikan bahasa Bali.

## 2.5 Bahasa Bali dalam Kehidupan Sosial Keagamaan

Bahasa Bali tidak terpisahkan dari kehidupan beragama Hindu di Bali. Terutama aksara Bali sebagai bahasa tulisnya bahasa Bali masih eksis digunakan sebagai salah satu ritus dalam upacara agama seperti: *ngaben* (pembuatan *kajang*), *mlaspas* bangunan (pembuatan *ulap-ulap*), *mawinten* (*rerajahan* pada anggota badan orang yang *diwinten*), *madiksa* (*rerajahan* yang dilakukan oleh *Pandita nabe* pada anggota badan yang *didiksa*), *macaru* (*rerajahan* yang dilakukan oleh *Pandita/Pinandita* pada tempat yang akan dibuatkan upacara *caru*), dan sebagainya (Suweta, 1999:76-88; sudiarta, 2000:56; dan Watra, 2009:30-38). Aksara Bali yang digunakan dalam upacara agama Hindu di Bali tergolong *aksara modre* yang sering juga disebut dengan *aksara wijaksana*, *aksara wayah*, *aksara pingit*, dan aksara suci (Bagus, 1980:10-11).

Dalam era kritis dewasa ini, di mana segala sesuatunya diukur dengan logika berpikir yang ilmiah, aktivitas agama Hindu pun ingin dipahami oleh umatnya dengan baik. Apalagi dari kalangan generasi muda, kegiatan upacara agama Hindu selalu ingin diketahui maknanya. Demikian juga simbol-simbol aksara yang digunakan sebagai simbol agama, hendaknya juga bisa dipahami. Namun, masih ada sebagian besar masyarakat Hindu tidak memahami simbol-simbol aksara Bali *Modre* dalam upacara agama Hindu tersebut. Apabila

simbol-simbol agama Hindu tidak dipahami oleh umatnya, bisa saja aktivitas beragama hanya menjadi seremonial profan belaka, yang tidak bisa secara maksimal memberikan nilai tambah terhadap peningkatan *srada* dan *bhakti* umat Hindu di Bali.

## 2.6 Perencanaan Bahasa Bali

Kebijakan dan perencanaan adalah dua kata yang memiliki pengertian berbeda, walaupun saling berhubungan. Kata kebijakan berasal dari kata bijak yang bermakna rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam organisasi/pemerintahan (Ali, 1995:131), sedang perencanaan merupakan proses, perbuatan, dan cara merencanakan sesuatu yang akan dikerjakan (Ali, 1995:832). Dalam konteks kebijakan bahasa Bali, kebijakan yang dimaksud merupakan keputusan politik sebagai *policy* pemerintah, yang berawal dari diterbitkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 385 Tahun 1992 tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2013 tentang Bahasa, Aksara, Sastra Bali pada Pendidikan Dasar dan Menengah. Sedangkan perencanaan adalah sesuatu yang diprogram akan dilakukan sebagai implementasi untuk memenuhi kebijakan yang dibuat, misalnya beberapa perencanaan bahasa Bali seperti: pembakuan bahasa Bali, pembentukan istilah, penggunaan *sor-singgih basa* Bali, penggunaan aksara Bali, berkomunikasi bahasa Bali dalam bertutur, kesediaan buku ajar, Tenaga Guru/Penyuluh bahasa Bali profesional, kurikulum bahasa Bali, dan sebagainya.

Dalam sistem manajemen, segala sesuatunya harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga dalam hal kebahasaan, agar bahasa tidak berkembang secara liar apa adanya, perlu pengaturan-pengaturan agar bahasa dapat tumbuh kembang dan berdaya

guna secara maksimal (Jendra, 2007:180). Khusus bahasa Bali, sementara ini tumbuh kembangnya masih belum sesuai harapan. Hal ini tampak dari beberapa fenomena diantaranya: tidak digunakannya bahasa Bali sebagai bahasa ibu pada sebagian kelompok masyarakat terutama kelas menengah di daerah perkotaan, penutur mengalami kesulitan dalam berbahasa Bali yang baik dan benar sesuai ketentuan *sor singgih basa* Bali, penulisan aksara Bali dalam pembuatan papan nama yang tidak sejalan dengan upaya pelestarian bahasa Bali, terjadinya alih kode dalam berbahasa Bali secara berlebihan dan tumpang tindih, mulai ditinggalkannya bahasa dan aksara Bali, ketidakmampuan warga Bali membaca lontar sebagai warisan budaya adiluhung, dan sebagainya. Semua fenomena tersebut memerlukan manajemen dari pemerintah terkait dengan kebijakan bahasa (*language policy*) dan perencanaan bahasa (*language planning*) (Haugen, 1961:68-81; Fishman (ed.), 1968:673-687; Jendra, 2007:179-200).

## 2.7 Perencanaan Pembentukan Istilah

Sebagai bahasa yang hidup dan berkembang, tentu bahasa Bali tidak luput dari munculnya istilah-istilah baru, di samping juga adanya istilah yang mulai hilang tidak terpakai lagi. Dalam hal pembentukan istilah, pemerintah bersama Lembaga Bahasa, Lembaga/Dinas terkait, dan Perguruan Tinggi, perlu membuat kebijakan dalam pembentukan istilah. Terkait dengan kebijakan pembentukan istilah, perlu dipertimbangkan mengutamakan bahasa Bali yang ada; baik dengan cara merevitalisasi dari bahasa Bali yang dianggap sudah ditinggalkan, maupun membuat istilah baru bahasa Bali yang diambil dari internal bahasa Bali yakni Bahasa Bali Kuna dan Bahasa Bali Tengahan (Bawa, dkk., 1984/1985:27-75). Apabila tidak ada dalam internal bahasa Bali, dapat diambil dari bahasa serumpun atau dari bahasa yang secara historis berpengaruh langsung terhadap perkembangan

bahasa Bali seperti: Bahasa Jawa kuno, Bahasa Sansekerta, dan Bahasa Indonesia (Suweta, 2008; Sharma, 1985; Soebadio, 1983, Surada, 2007). Apabila dari bahasa serumpun juga belum mampu mewadahi istilah baru, karena terkait dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bisa juga dipungut dari bahasa asing seperti: Inggris, Belanda, Jepang, dan bahasa asing lainnya.

Disadari atau tidak, masih terlalu banyak kesulitan menemukan istilah-istilah baru dalam berbahasa Bali, terutama berbahasa Bali dalam kegiatan formal seperti: mengajar, seminar, *dharmatula*, *berdharmawacana*, berpidato, memberikan penyuluhan, dalam kegiatan adat, dan dalam kegiatan agama Hindu di Bali. Dalam kesulitan menemukan istilah tersebut, biasanya narasumber melakukan alih kode ke dalam bahasa lain (misalnya Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan bahasa lainnya). Bahkan alih kode ke dalam bahasa lain kadang lebih dominan, sehingga menimbulkan kerancuan dalam berbahasa Bali. Hal ini menandakan amat terbatasnya istilah-istilah bahasa Bali terkait dengan perkembangan jaman yang bersentuhan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melihat keadaan seperti ini pemerintah seharusnya segera berupaya mengambil kebijakan terkait dengan pembentukan istilah bahasa Bali sejenis kamus yang berkaitan dengan berbagai aspek istilah: ekonomi, politik, sosiologi, hukum, pertanian, agama, pengobatan, pendidikan, dan kamus istilah bahasa Bali yang lain.

## 2.8 Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Perencanaan bahasa Bali juga sangat penting dalam bidang penelitian dan pengembangan. Penelitian bahasa Bali yang dilakukan diharapkan bisa menginformasikan secara objektif eksistensi riil bahasa Bali di masyarakat; baik terkait dengan mikro linguistik (fonologi, morfologi, sintaksis,

semantik, leksikologi, etimologi), makrolinguistik (sosiolinguistik, linguistik kebudayaan), maupun linguistik terapan (bahasa Bali dalam kegiatan agama Hindu, bahasa Bali dalam pendidikan, bahasa Bali dalam dinamika kurikulum), dan penelitian bahasa Bali dalam bidang lainnya. Kegiatan penelitian ini diharapkan akan membantu pemerintah sebagai pihak *policy maker/decision making* dalam pengambilan keputusan yang tepat terkait dengan bahasa Bali dan sekaligus sebagai masukan evaluatif terkait dengan keseluruhan proses pelaksanaan perencanaan bahasa (Jendra, I Wayan, 2007:200).

Dalam hubungan dengan penelitian dan pengembangan, eksistensi bahasa Bali juga tidak boleh menutup mata dari perkembangan teknologi yakni dengan lahirnya program komputerisasi huruf Bali yakni Bali Simbar (ada beberapa jenis program Bali Simbar). Agar tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat, program mana dari sekian banyak program Bali Simbar ini layak digunakan, Pemerintah Bali harus mengambil langkah kebijakan, apakah menentukan salah satu program sebagai acuan, atau mengkolaborasi dari beberapan program Bali Simbar yang ada. Karena memang harus diakui bahwa dengan adanya program Bali Simbar, teknologi ini sangat membantu dalam bidang kegiatan menulis, penelitian, dan pengembangan teknologi pembelajaran bahasa Bali.

## 2.9 Perencanaan Pendidikan

Keseluruhan tentang kebijakan dan perencanaan bahasa Bali sebagai ide pemikiran penulis sebagaimana yang telah dikemukakan di depan, kebijakan dan perencanaan dalam bidang pendidikan merupakan sentral dari perencanaan dan kebijakan yang lain. Karena kebijakan dan perencanaan yang dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan bahasa Bali (terkait degradasi bahasa tutur, tulisan aksara Bali, ketertinggalan perisitilahan,

kesusastraan, dan sebagainya) hanya akan mampu diatasi melalui jalur pendidikan, yang terencana dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Hal ini sudah sejalan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Bali melalui Peraturan Daerah Nomor 385 1992 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2013, hanya implementasinya agar sesuai dengan harapan masyarakat belum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 385, Tahun 1992, Pasal 5 menyebutkan bahwa bahasa Bali sebagai muatan lokal diajarkan di di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMU/SMK). Peraturan Daerah ini diperkuat lagi dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2013, pada Pasal 2 (1) menyebutkan bahwa Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali diajarkan pada semua jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagai mata pelajaran di Propinsi. Hal ini berarti pemerintah sudah mengambil kebijakan (*language policy*) dalam bidang bahasa Bali, yang harus diimplementasikan dengan baik. Agar terealisasi secara sistematis sesuai dengan harapan masyarakat Bali, diperlukan perencanaan bahasa (*language planning*) yang baik dan konsisten dalam pendidikan bahasa Bali yang meliputi: tenaga pendidik dan kependidikan, proses pendidikan, evaluasi pendidikan, kesediaan buku ajar, pembenahan kurikulum, sarana-prasarana penunjang, dan sebagainya.

Melalui jalur pendidikan, akan menjadi sangat penting upaya untuk menumbuhkan bahasa Bali, karena tidak semata bermuatan pelestarian bahasa Bali, tetapi bagaimana bahasa Bali bisa bertumbuh dan berkembang secara sistematis, cermat, terprogram, dan bisa dipahami oleh masyarakat sebagai ranah keilmuan penting. Melalui jalur pendidikan disiplin pembelajaran bahasa Bali akan tertata sesuai dengan ketentuan kurikulum, karena terikat dengan proses yang

harus dilalui dan evaluasi sebagai wujud 'pemaksaan belajar' agar proses pembelajaran bahasa Bali bisa berlangsung dengan baik. Dalam konteks ini pemerintah daerah Bali semestinya tidak terpengaruh pada penerapan kurikulum 2013 yang menjadi polemik pro kontra di masyarakat sampai sekarang, yang 'mengkerdikan bahasa Bali' karena hanya didomplengkan pada mata pelajaran muatan lokal seni budaya. Apalagi Pemerintah Bali sudah memiliki dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 385/1992 dan Peraturan Gubernur Nomor 20/2013 yang berarti mewajibkan bahasa Bali diajarkan dari tingkat SD sampai SMU/SMK, semestinya pemerintah tidak perlu bimbang dan ragu lagi dalam mengambil keputusan yang lebih realistis sebagai implementasi dari Peraturan daerah Bali 345/1992 dan Peraturan Gubernur Bali 20/2013 tersebut.

Terkait dengan perencanaan bahasa Bali melalui jalur pendidikan, justru yang menjadi kendala adalah masih terbatasnya tenaga guru bahasa Bali yang profesional. Akibat masih sangat kurangnya pengadaan guru bahasa Bali oleh pemerintah, banyak mata pelajaran bahasa Bali diajarkan oleh tenaga guru yang tidak berlatar belakang profesional pendidikan bahasa Bali. Hal ini tentu menjadi hambatan misi untuk melestarikan bahasa Bali melalui kegiatan pendidikan, yang sistematis, terprogram, berpegang pada pengembangan keilmuan, belum maksimal bisa dilakukan. Semestinya kalau Pemerintah Bali (baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten) benar-benar menganggap bahasa Bali sebagai aset daerah Bali sebagai kekhasan budaya yang akan dikembangkan sebagai salah satu identitas ke-Bali-an dalam rangka menjadikan daerah Bali sebagai daerah otonomi khusus (Otsus), tentunya pengangkatan guru bahasa Bali, pembenahan kurikulum pendidikan bahasa Bali, pengadaan buku-buku ajar bahasa Bali, menjadi skala prioritas.

Kebijakan dan perencanaan pemerintah tentang bahasa Bali pada pendidikan formal, perlu ditunjang juga dalam pendidikan informal dan nonformal. Secara informal, pemerintah perlu mengambil kebijakan agar bahasa Bali digunakan dalam komunikasi internal penutur bahasa Bali dalam keluarga, agar fungsi hakiki bahasa Bali sebagai bahasa ibu bisa berlangsung sebagaimana mestinya. Demikian juga dalam pendidikan nonformal, pemerintah dapat mengambil kebijakan dan perencanaan agar bahasa Bali dijadikan sebagai bahasa tutur secara lebih luas pada masyarakat Bali, bahkan kalau mungkin menghimbau agar seluruh instansi yang ada di Bali, baik negeri maupun swasta minimal sekali dalam seminggu wajib menggunakan bahasa Bali yang dimonitoring oleh Instansi Dinas terkait melalui para penyuluh bahasa Bali. Dalam konteks ini kita patut mencontoh sebagaimana telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat tentang Bahasa Sunda dan Pemerintah Jawa Tengah tentang Bahasa Jawa yang secara intensif melestarikan bahasa daerahnya melalui berbagai jalur kebijakan dan perencanaan bahasa (Bali Post/afp/ant, 21 November 2014:24).

### III. PENUTUP

Bahasa Bali memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial, budaya, dan agama Hindu di Bali, yakni: bahasa dalam tutur/bahasa ibu, berkesenian/bersastra, dan upacara agama Hindu/*aksara modre*. Agar lebih maksimal dalam pemberdayaannya, yakni: terarah, terprogram, dan tersistem; perlu keijakan dan perencanaan bahasa secara realistis yakni: pembentukan istilah, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan. Peraturan Daerah Nomor 345 Tahun 1992 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2013 merupakan dasar kebijakan tersebut, tinggal perencanaan lebih realistis, dan implementasi secara konsisten dan konsekuen.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Lukman. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Anom, I Gusti Ketut, dkk. 1983. Tata Bahasa Bali. Denpasar: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- . 2008. Kamus Bali-Indonesia Beraksara Latin dan Bali. Denpasar: Kerjasama Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dengan Badan Pembina Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali Provinsi Bali.
- Antara, I Gusti Putu. 2009. Sejarah Sastra Bali Modern. Singaraja: Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Agama Hindu.
- dan I Ketut Ginarsa. 1978. Kembang Rampe Kesusastraan Bali Anyar, Wewidangan 2. Denpasar: Yayasan Saba Sastra Bali.
- , dkk. 1979. Unda Usuk Bahasa Bali. Denpasar: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia dan daerah.
- . 1977. Kesusastraan Bali (satua Bawak Mabasa Bali). Singaraja: Balai Penelitian Bahasa. dkk. 1975. Masalah Pembakuan Bahasa Bali. Singaraja: Balai Penelitian Bahasa, Departemen Pendidikan dan kebudayaan.
- . 1980. Aksara dalam Kebudayaan Bali, Suatu Kajian Antropologi (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Antropologi Budaya pada Fakultas Sastra Universitas Udayana pada tanggal 20 Desember 1980). Denpasar: Universitas Udayana.
- Bawa, I Wayan, dkk. 1984/1985. Studi Sejarah Bahasa Bali. Denpasar: Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Proyek Studi Sejarah Bahasa Bali.
- Chaer, Abdul dan Leonie Agustina. 1995. Sociolinguistik Perkenalan Awal. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Fishman, J.A. 1968. Reading in the Sociology of Language. The Hague: Moulton.
- Ginarsa, Ketut. 1984/1985. Paribasa Bali. Denpasar: Pemerintah Daerah Tingkat I Bali, Proyek Penyusunan Naskah dan Pencetakan dan Buku-Buku Pelajaran dan Satua Bali, Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- Halim, Amran. 1980. Politik Bahasa Nasional. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Haugen, E. 1976. "Dialect, Language, Mation" dalam Dill, Anwar S. (Ed.) 1972.
- Ibrahim, Abd. Syukur. 1993. Kapita Selekta Sociolinguistik. Surabaya: Usaha Nasional.
- Jendra, I Wayan, dkk. 1975/1976. Sebuah Deskripsi tentang Latar Belakang Sosial Budaya Bahasa Bali. Denpasar: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Jendra, I Wayan. 1991. Dasar-Dasar Sociolinguistik. Denpasar: IKAYANA
- Jendra, I Wayan. 2007. Sociolinguistik, Teori, dan Penerapannya. Surabaya: Paramita.
- Medra, I Nengah, dkk. 1998. Pedoman Pasang Aksara Bali. Denpasar: Dinas Kebudayaan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali.
- Soebadio, Haryati. 1983. Tata Bahasa Sanskerta Ringkas. Jakarta: Djambatan.
- Subandia, I Made, dkk. 2009. Panduan Penulisan Aksara Bali dan Aksara Latin. Denpasar: Balai Bahasa.
- Sudiarta, I Wayan. 2000. Ulap-Ulap Wacana Ritual Masyarakat Hindu di Bali (Tesis). Denpasar: Program Magister (S2) Linguistik, Program Pasca Sarjana Unud.